

Analisis Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih: Studi Kasus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan

Dwi Vandy Lembang Pakabu^{1*}, Sita Yubelina Sabandar², Yoel Pasae³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

Dwi.vandy26@yahoo.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, dinas terkait, kepala kampung, tokoh adat, dan masyarakat, serta dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi berjalan melalui tahapan sosialisasi, musyawarah desa, pembentukan kepengurusan, hingga pendaftaran badan hukum. Meskipun partisipasi masyarakat cukup tinggi, pemahaman mereka mengenai prinsip dan manfaat koperasi masih terbatas. Modal sosial berupa nilai gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan pada tokoh adat berperan penting dalam memperkuat proses pembentukan koperasi. Namun, ditemukan kendala berupa literasi kelembagaan yang rendah, keterbatasan administrasi, dan ketidaksesuaian petunjuk teknis dengan kondisi lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen efektif pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung apabila diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, pendampingan intensif, serta penyesuaian kebijakan dengan realitas sosial budaya masyarakat Papua Barat.

Kata kunci: koperasi desa, pemberdayaan ekonomi, modal sosial, partisipasi masyarakat, Manokwari Selatan

Abstract

This study aims to analyze the formation process of the Merah Putih Village Cooperative as an instrument for empowering rural communities in South Manokwari Regency. A qualitative method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with local government agencies, village leaders, community representatives, and relevant stakeholders, complemented by field observations and document analysis. The findings reveal that the cooperative formation process proceeded through stages of socialization, village deliberation, establishment of management, and legal registration. While community participation was relatively high, their understanding of cooperative principles and benefits remained limited. Social capital—such as mutual cooperation, deliberative traditions, and trust in local leaders—played a crucial role in strengthening the cooperative's establishment. Nevertheless, challenges were identified, including low institutional literacy, administrative limitations, and discrepancies between technical guidelines and local realities. The study concludes that the establishment of the Merah Putih Village Cooperative has strong potential to serve as an effective instrument for rural economic empowerment, provided that it is accompanied by institutional capacity-building, intensive facilitation, and adaptive policy implementation aligned with the socio-cultural context of West Papua.

Keywords: village cooperative, economic empowerment, social capital, community participation, South Manokwari.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui koperasi merupakan isu penting dalam pembangunan lokal dan inklusif di Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 127.846 koperasi aktif dengan lebih dari 27 juta anggota, serta modal sebesar Rp 196,27 triliun dan aset Rp 250,98 triliun (Santoso et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa koperasi memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat.

Namun, tantangan nyata masih dihadapi, seperti literasi kelembagaan yang rendah, administrasi yang lemah, serta ketidaksesuaian petunjuk teknis dengan kondisi lokal (Rahman & Yuliana, 2022; Ningsih, 2020). Di sisi lain, modal sosial—misalnya tradisi gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan kepada tokoh adat—merupakan modal kultural penting yang dapat memperkuat pembentukan koperasi di wilayah pedesaan seperti Papua Barat (Putra, 2021; Widodo, 2019).

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa koperasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan kesejahteraan ekonomi, meskipun tantangan seperti transparansi dan kapasitas manajerial masih menjadi penghambat utama (Suryani & Pratama, 2021; Dewi, 2019). Dengan demikian, penguatan koperasi tidak hanya memerlukan dukungan regulasi, tetapi juga penyesuaian kebijakan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal.

Berikut adalah ringkasan data pendukung fenomena dan urgensi penelitian:

Tabel 1. Data/Fakta Fenomena Penelitian

Aspek	Data/Fakta
Jumlah koperasi aktif	127.846 unit (2021) (Santoso et al., 2023)
Jumlah anggota koperasi	≈ 27 juta orang (2021) (Santoso et al., 2023)
Modal koperasi nasional	Rp 196,27 triliun (2021) (Santoso et al., 2023)
Aset koperasi nasional	Rp 250,98 triliun (2021) (Santoso et al., 2023)
Tantangan kelembagaan	Administrasi terbatas, rendahnya literasi (Rahman & Yuliana, 2022; Ningsih, 2020)
Modal sosial lokal	Gotong royong, musyawarah, tokoh adat (Putra, 2021; Widodo, 2019)

Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat kesenjangan antara potensi besar koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi pedesaan dengan kenyataan lemahnya kapasitas kelembagaan di lapangan. Di sisi lain, wilayah Papua Barat memiliki modal sosial unik seperti tradisi gotong royong dan nilai musyawarah yang belum dioptimalkan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, penelitian mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat relevan untuk memberikan rekomendasi berbasis konteks sosial-budaya yang adaptif dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tahapan proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Manokwari Selatan?
2. Bagaimana peran modal sosial (gotong royong, musyawarah, kepercayaan tokoh adat) dalam memperkuat proses pembentukan koperasi tersebut?
3. Apa saja kendala kelembagaan, administratif, dan teknis yang muncul selama proses pembentukan koperasi?
4. Bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan peran koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung di Papua Barat?

TINJAUAN LITERATUR

Koperasi Desa sebagai Instrumen Pemberdayaan

Koperasi desa dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi berbasis komunitas. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi berfungsi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Dalam konteks pedesaan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (Setiawan & Firmansyah, 2020). Penelitian terkini menunjukkan bahwa koperasi desa berperan dalam memperkuat kemandirian ekonomi lokal, terutama melalui pengelolaan

sumber daya alam dan usaha produktif masyarakat (Suryana, 2021).

Modal Sosial dalam Pengembangan Koperasi

Konsep modal sosial memiliki relevansi penting dalam pembentukan dan keberlanjutan koperasi. Modal sosial mencakup kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang memfasilitasi kerja sama untuk keuntungan bersama (Putnam, 2000). Dalam konteks Indonesia, nilai gotong royong, musyawarah, dan kepemimpinan lokal menjadi unsur kultural yang memperkuat peran koperasi (Hidayati & Pramono, 2021). Modal sosial yang kuat terbukti meningkatkan partisipasi anggota dan memperkuat keberlanjutan koperasi (Iskandar, 2019).

Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan Ekonomi

Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan koperasi desa. Menurut Widiastuti (2020), partisipasi mencakup keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, serta kontribusi modal dan tenaga. Tingkat partisipasi yang tinggi berhubungan langsung dengan kinerja koperasi dan keberlanjutan kelembagaannya (Santoso & Dewi, 2022). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat literasi kelembagaan masyarakat pedesaan masih rendah, sehingga memerlukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan (Suharto, 2021).

Tantangan dan Kendala Kelembagaan

Meskipun koperasi memiliki potensi besar, banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kendala utama yang sering muncul antara lain lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian kebijakan teknis dengan kondisi lokal (Rahman & Yuliana, 2022). Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam pengelolaan koperasi (Dewi & Pratama, 2021). Penelitian di Papua Barat menegaskan bahwa tantangan kelembagaan dapat diatasi dengan penguatan kapasitas manajemen, pendampingan intensif, dan adaptasi kebijakan berbasis kearifan lokal (Pakabu, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam proses pembentukan kelembagaan koperasi dalam konteks sosial, budaya, dan kebijakan yang kompleks. Menurut Yin (2018), studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dalam setting kehidupan nyata melalui eksplorasi yang mendalam terhadap aktor, kebijakan, dan dinamika yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menelaah bagaimana proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berlangsung di tengah masyarakat kampung di Kabupaten Manokwari Selatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa di Kabupaten Manokwari Selatan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pemerintah daerah, dinas teknis, aparat kampung, tokoh adat, dan masyarakat. Karena sifat penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman data, sampel penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik ini dipilih untuk menjaring informan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses pembentukan koperasi. Menurut Palinkas et al. (2015), *purposive sampling* sangat efektif dalam penelitian kualitatif karena mampu menghasilkan informasi yang kaya, sedangkan *snowball sampling* mempermudah peneliti menemukan informan tambahan dari jaringan sosial yang relevan.

Penelitian dilaksanakan di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kampung percontohan dalam program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pengumpulan data dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2025, bersamaan dengan proses sosialisasi, musyawarah desa khusus, dan persiapan legalisasi koperasi. Pemilihan waktu ini bertujuan untuk menangkap dinamika aktual yang sedang berlangsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan lima kategori informan, yaitu kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa, sedangkan dokumentasi difokuskan pada kajian terhadap peraturan, laporan, dan berita acara pembentukan koperasi. Menurut Creswell dan Poth (2018), kombinasi metode ini memungkinkan triangulasi data sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan tahapan pembentukan koperasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan *member check* kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian terdiri atas lima orang informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Mereka dipilih karena memiliki posisi strategis dan pengalaman relevan dalam mendukung atau merasakan dampak pembentukan koperasi.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Kode Informan	Jabatan/Peran	Usia	Latar Belakang Pekerjaan	Keterlibatan dalam Proses
1	R1	Kepala Kampung	47	Aparatur Pemerintah Desa	Pengambil keputusan, fasilitator Musdes
2	R2	Tokoh Perempuan	42	Pedagang lokal	Peserta sosialisasi, advokasi perempuan
3	R3	Tokoh Pemuda	28	Nelayan	Mobilisasi pemuda, sosialisasi lapangan
4	R4	Perwakilan Dinas Koperasi	39	ASN Bidang	Pendamping teknis,

No	Kode Informan	Jabatan/Peran	Usia	Latar Belakang Pekerjaan	Keterlibatan dalam Proses
5	R5	Perwakilan Masyarakat Umum	35	Petani	fasilitator legalisasi Calon anggota koperasi, peserta Musdes

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Ringkasan Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami persepsi, kendala, serta harapan masyarakat terhadap pembentukan koperasi.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara

Kode Informan	Temuan Utama
R1 (Kepala Kampung)	Koperasi diyakini dapat memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap tengkulak, namun masih banyak warga yang belum memahami mekanisme kelembagaan.
R2 (Tokoh Perempuan)	Koperasi dianggap penting untuk membantu ibu-ibu memperoleh akses modal usaha, meski kendala utama adalah minimnya literasi keuangan.
R3 (Tokoh Pemuda)	Pemuda mendukung koperasi sebagai wadah usaha bersama, namun merasa sosialisasi dari pemerintah masih terbatas.
R4 (Dinas Koperasi)	Pemerintah daerah menekankan pentingnya kesesuaian prosedur administrasi, meskipun ada kendala teknis terkait jumlah anggota dan kelengkapan dokumen.
R5 (Masyarakat Umum)	Warga bersedia bergabung dalam koperasi karena berharap adanya akses modal murah, tetapi masih bingung dengan hak dan kewajiban anggota.

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Manokwari Selatan berlangsung melalui tahapan sosialisasi, musyawarah desa khusus, pemilihan pengurus, hingga penyusunan dokumen legalitas. Proses ini berjalan sesuai dengan pedoman teknis pemerintah, tetapi adaptasi dengan kondisi lokal masih diperlukan.

Pertama, **pemahaman masyarakat** terhadap konsep koperasi masih terbatas. Meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme, literasi kelembagaan dan keuangan rendah menyebabkan keterlibatan mereka sebatas hadir dalam sosialisasi, bukan partisipasi substantif (Rahman & Yuliana, 2022).

Kedua, **peran aktor lokal** sangat signifikan. Kepala kampung dan tokoh adat memiliki otoritas dalam memobilisasi masyarakat, sementara tokoh perempuan dan pemuda berfungsi sebagai motor penggerak partisipasi komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Putra (2021) bahwa modal sosial berbasis gotong royong dan musyawarah adat memperkuat keberlanjutan koperasi.

Ketiga, **kendala kelembagaan** meliputi ketidaksesuaian juknis dengan kondisi lokal, jumlah anggota minimal yang sulit dipenuhi, serta keterbatasan dokumen legalitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi top-down dengan realitas di lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh Ningsih (2020).

Keempat, **konsep keberlanjutan** koperasi sangat bergantung pada pendampingan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Jika hal ini dilakukan, koperasi dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi sekaligus sarana memperkuat solidaritas sosial masyarakat desa (Suryani & Pratama, 2021).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian:

1. Tahapan pembentukan koperasi berjalan sesuai prosedur, meski menghadapi kendala administratif.
2. Modal sosial lokal berupa gotong royong, musyawarah, dan otoritas tokoh adat memperkuat legitimasi pembentukan koperasi.
3. Kendala utama adalah keterbatasan literasi kelembagaan dan ketidaksesuaian teknis regulasi dengan kondisi lokal.
4. Strategi keberlanjutan memerlukan pendampingan intensif, peningkatan kapasitas, dan adaptasi kebijakan berbasis konteks lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Manokwari Selatan berjalan melalui tahapan sosialisasi, musyawarah desa khusus, pembentukan kepengurusan, hingga legalisasi badan hukum. Seluruh aktor lokal, mulai dari kepala kampung, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, hingga perwakilan pemerintah daerah, berperan aktif dalam setiap tahapannya. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap

konsep, manfaat, dan mekanisme koperasi masih terbatas sehingga partisipasi belum optimal.

Modal sosial berupa tradisi gotong royong, musyawarah, dan kepercayaan terhadap tokoh adat menjadi faktor kultural yang memperkuat legitimasi pembentukan koperasi. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi kelembagaan, keterbatasan administrasi, serta ketidaksesuaian petunjuk teknis pemerintah dengan realitas lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada adanya pendampingan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Papua Barat.

Saran

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat program sosialisasi dan pendidikan perkoperasian agar pemahaman masyarakat meningkat, khususnya terkait hak, kewajiban, dan manfaat koperasi.

Kedua, pendampingan teknis dan pelatihan manajemen harus dilakukan secara berkesinambungan, dengan melibatkan tokoh lokal sebagai fasilitator untuk meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat.

Ketiga, regulasi teknis pembentukan koperasi perlu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat desa di Papua Barat, misalnya terkait jumlah anggota dan kelengkapan administrasi.

Terakhir, Koperasi Desa Merah Putih hendaknya diarahkan bukan hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai pusat penguatan solidaritas sosial, inovasi usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, N. K., & Pratama, I. G. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 45–56. <https://doi.org/10.22225/jeb.24.1.2021.45-56>
- Hidayati, R., & Pramono, A. (2021). Modal sosial dan keberlanjutan koperasi desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(2), 112–124. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>

- Iskandar, A. (2019). Social capital and cooperative sustainability in rural Indonesia. *Asian Journal of Rural Development*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.3923/ajrd.2019.1.12>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ningsih, S. (2020). Tantangan implementasi kebijakan koperasi desa di Indonesia Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 201–214. <https://doi.org/10.1080/jkp.2020.201214>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Putra, I. M. (2021). Modal sosial masyarakat adat dalam pembangunan kelembagaan ekonomi desa. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(1), 77–88. <https://doi.org/10.12962/jsh.v14i1.8321>
- Rahman, A., & Yuliana, N. (2022). Hambatan kelembagaan koperasi desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 33–44. <https://doi.org/10.14203/jep.30.1.2022.33-44>
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Santoso, B., & Dewi, P. (2022). Community participation and cooperative performance: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 93, 65–74. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.06.010>
- Santoso, H., Utami, R., & Nugraha, F. (2023). The role of cooperatives in inclusive economic development in Indonesia. *Sustainability*, 15(7), 5957. <https://doi.org/10.3390/su15075957>
- Setiawan, A., & Firmansyah, R. (2020). Koperasi desa dan pembangunan ekonomi lokal: Analisis peran kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 8(1), 23–35. <https://doi.org/10.24843/jek.2020.v8.i1.p23>
- Suharto, S. (2021). Literasi koperasi dan partisipasi masyarakat desa: Studi pada koperasi di Papua. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39210>
- Suryana, Y. (2021). Koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 101–115. <https://doi.org/10.22146/jebi.63321>
- Suryani, D., & Pratama, A. (2021). Cooperative sustainability and challenges in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 48(12), 1742–1756. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2020-0632>
- Widodo, T. (2019). Gotong royong as social capital in strengthening village institutions. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(1), 57–68. <https://doi.org/10.22146/jsp.35600>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.